

## COLLECTIVE ACTION DALAM JARINGAN IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Andi Ridha Rimbawan Abidin<sup>1(a)</sup>, Mohammad Thahir Haning<sup>2(b)</sup>, Gita Susanti<sup>3(c)</sup>,  
Syahribulan<sup>4(d)</sup>, Arifin Fajar Putera<sup>5(e)</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Hasanuddin, Makassar Sulawesi Selatan

<sup>a)</sup>[Andiridharimbawanabidin@gmail.com](mailto:Andiridharimbawanabidin@gmail.com), <sup>b)</sup>[thahir.haning@gmail.com](mailto:thahir.haning@gmail.com), <sup>c)</sup>[Gitasusanti65@gmail.com](mailto:Gitasusanti65@gmail.com),

<sup>d)</sup>[Syahribulansunusi@gmail.com](mailto:Syahribulansunusi@gmail.com), <sup>e)</sup>[Arifin.fajar.putera@gmail.com](mailto:Arifin.fajar.putera@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

19-11-2024

Diterbitkan Online:

31-12-2024

#### Kata Kunci:

Tindakan Kolektif,  
Implementasi Program,  
Percepatan Penurunan,  
Stunting

#### Keywords:

Collective Action, Program  
Implementation, Accelerated  
Reduction, Stunting

#### Corresponding Author:

[Aiiutama88@gmail.com](mailto:Aiiutama88@gmail.com)

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i4.1155>

### ABSTRAK

Provinsi Sulawesi Barat mencatat angka stunting 0,3% di bawah Nusa Tenggara Timur yang tertinggi secara nasional, jauh melampaui rata-rata nasional 21,6%. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi aksi kolektif dalam upaya penurunan stunting di Sulawesi Barat menggunakan teori Tindakan Kolektif oleh Carlsson (2000) dengan enam dimensi: Faktor Kontekstual, Definisi Masalah, Pertumbuhan dan Kepercayaan, Faktor Partisipasi, Mobilisasi Aktor, serta Koordinasi dan Kontrol. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling* dari kalangan pejabat pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tiga kendala utama dalam aksi kolektif: (1) terbatasnya sosialisasi stunting terutama di wilayah pedesaan, (2) lemahnya sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, serta (3) kurangnya dukungan pemangku kepentingan yang menyebabkan program berjalan sporadis. Faktor-faktor seperti pernikahan dini, minimnya edukasi kesehatan, dan rendahnya kesadaran masyarakat turut memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya strategi komunikasi inklusif, penguatan koordinasi lintas sektor, dan peningkatan komitmen bersama dalam intervensi stunting.

### ABSTRACT

West Sulawesi province recorded a stunting rate of 0.3% below East Nusa Tenggara, the highest nationally, far exceeding the national average of 21.6%. This study aims to analyze the implementation of collective action in efforts to reduce stunting in West Sulawesi using Carlsson's Collective Action theory (2000) with six dimensions: Contextual Factors, Problem Definition, Growth and Trust, Participation Factors, Actor Mobilization and Coordination and Control. Using a qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and document reviews with informants selected by *purposive sampling* from among government officials, civil servants, and the community. The results showed three main obstacles to collective action: (1) limited socialization of stunting, especially in rural areas, (2) weak synergy between local government, health workers, and the community, and (3) lack of stakeholder support that causes the program to run sporadically. Factors such as early marriage, lack of health education, and low public awareness also exacerbate the situation. This study recommends inclusive communication strategies, strengthening cross-sector coordination, and increasing shared commitment in stunting interventions.

## PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi masalah gizi yang cukup serius, yang tercermin dari tingginya angka kasus gizi buruk pada anak balita. Salah satu dampak dari kurangnya gizi yang berkelanjutan adalah stunting, yang merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak anak. Stunting dapat menyebabkan anak tumbuh lebih pendek dari teman sebaya mereka dan mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif. Fenomena ini menjadi masalah kesehatan utama yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, stunting juga dapat terjadi sejak dalam kandungan akibat kekurangan asupan gizi ibu hamil, terutama protein, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung.

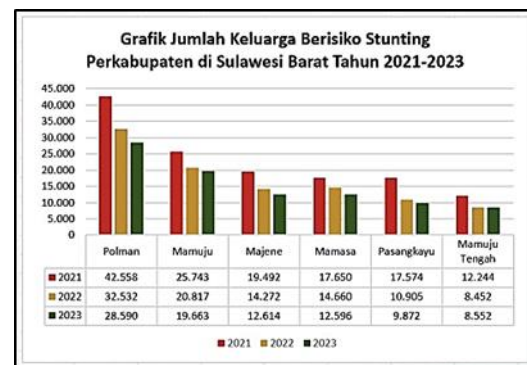
Masalah stunting di Indonesia masih sangat signifikan, dengan prevalensi nasional mencapai 21,6%, yang artinya hampir 2 dari setiap 10 (Sepuluh) balita mengalami stunting. Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang mengalami angka stunting tertinggi di Indonesia, menempati urutan kedua setelah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data yang ada, salah satu penyebab utama tingginya angka stunting di Sulawesi Barat adalah faktor pernikahan dini, yang masih merupakan budaya di masyarakat. Fenomena ini menjadi penyebab utama dari rendahnya gizi pada ibu hamil dan bayi, yang berujung pada tingginya prevalensi stunting.

Salah satu masalah yang dihadapi saat ini oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu pencegahan stunting dalam aksi bersama dalam perumusan suatu kebijakan percepatan penurunan terkait stunting. Dalam perkembangannya masalah Stunting, perlu dilakukan proses analisis yang memadai sehingga tidak multi tafsir atau bertentangan dengan kaidah serta norma-norma yang berlaku. Menurut Tilly (1981), tindakan kolektif terdiri dari semua kesempatan di mana sekelompok orang mengerahkan sumber dayanya, termasuk upaya mereka sendiri, untuk mencapai tujuan bersama. *Collective action* dilakukan untuk menangani suatu masalah yang krusial dalam suatu waktu atau wilayah, salah satunya yakni stunting. Pada Stunting menjadi masalah yang krusial, kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita

di dunia saat ini, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia.

Hasil pengamatan awal dari fenomena stunting menunjukkan bahwa meskipun telah mengalami penurunan yang signifikan, jumlah kasus stunting pada daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih terbilang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, langkah awal yang diperlukan dalam hal ini adalah melakukan pemetaan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting di daerah tersebut. Hal ini merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah, sebab bagaimana dalam pengambilan kebijakan yang efektif di Provinsi Sulawesi Barat, dapat dengan fokus pada perbaikan sistem dan analisis bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi.

Mobilisasi aktor *Collective Action*, keterlibatan stakeholder, termasuk jaringan pemerintah dari berbagai sektor, merupakan kunci utama dalam penanganan ini. Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, serta koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program-program penanggulangan stunting, dapat menciptakan solusi konkret yang efektif dan berkelanjutan. Dapat kita lihat dalam table jumlah angka masyarakat yang beresiko terdampak stunting diberbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut.



**Gambar 1. Data Keluarga Beresiko Stunting di Provinsi Sulawesi Barat**

Sumber: SIGA BKKBN (Pendataan Keluarga) 2021-2023

Data gambar diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Polman memiliki tingkat resiko stunting yang paling tinggi pada Tahun 2023 sebesar 28.590 Keluarga. Selanjutnya Kabupaten mamuju menduduki peringkat kedua dengan tingkat resiko stunting sebanyak 19.66. keluarga, sementara Kabupaten Majene sebanyak 12.614 keluarga. Selanjutnya Kabupaten Mamasa sebanyak 12.596 keluarga,

lalu Kabupaten Pasang kayu sebanyak 9.872 dan terakhir Kabupaten Mamuju tengah sebanyak 8.552 keluarga. Meskipun demikian terdapat penurunan signifikan dari 32.532 keluarga pada tahun 2022 menjadi 28.59 keluarga pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan Kabupaten Polman masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk terus menurunkan angka resiko stunting di Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam upaya menangani masalah stunting di Provinsi Sulawesi Barat, mobilisasi aktor dalam *Collective Action* sangatlah penting. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, hingga masyarakat lokal. Evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab utama dan pemicu tingginya angka stunting di setiap kabupaten. Program-program intervensi yang tepat perlu dirumuskan dan dilaksanakan dengan melibatkan semua stakeholder. Dengan demikian, kita dapat menciptakan strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah, sehingga dapat mencapai penurunan yang signifikan dalam angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat, mendekati atau bahkan melampaui angka prevalensi nasional.

Melihat masih sangat tingginya angka stunting di hampir seluruh Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Barat memberikan penilaian bahwa koordinasi lintas Sektor dalam pencegahan stunting masih terbilang belum berjalan dengan baik karena belum dilakukan secara optimal. Peran dan kesadaran masyarakat dalam upaya mencegah stunting juga sangat diperlukan dalam keberhasilan pencegahan stunting. Namun melihat keadaan yang terjadi saat ini, kerap kali ditemukan masyarakat yang belum mengetahui betul perihal bagaimana pencegahan stunting, baik dari definisi, penyebab, dampak yang ditimbulkan hingga penanggulangan yang dapat dilakukan.

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan dengan tingkatan urgensi dan fokus saat ini. Kesehatan erat kaitannya dengan kesejahteraan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga stunting dapat dihindari. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang memaparkan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah membahas penanganan stunting, kebanyakan berfokus pada intervensi berbasis program kesehatan atau nutrisi tanpa mempertimbangkan dinamika kebijakan publik yang melibatkan multipihak. Studi tentang *collective action* sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat penurunan angka stunting masih sangat terbatas, khususnya di Indonesia. Pencegahan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintahan, masyarakat, sektor swasta, maupun lembaga non-pemerintah. Dalam menghadapi permasalahan ini, peran jaringan pemerintahan menjadi sangat penting. Keberhasilan penurunan angka stunting tidak dapat tercapai hanya dengan upaya individual, namun memerlukan adanya koordinasi dan aksi kolektif (*Collective Action*) dari berbagai aktor yang terlibat. *Collective action* merupakan konsep yang mengacu pada upaya bersama untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor tunggal, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki kepentingan bersama.

Teori *Collective Action* yang dikembangkan oleh Carlsson (2000), menyatakan bahwa efektivitas aksi kolektif dipengaruhi oleh enam dimensi, yaitu: faktor kontekstual, definisi masalah, pertumbuhan dan kepercayaan, faktor partisipasi, mobilisasi aktor, serta koordinasi dan kontrol. Dalam konteks kebijakan publik, *collective action* telah banyak diterapkan untuk memahami kolaborasi multipihak di sektor pendidikan dan lingkungan, tetapi kajian dalam sektor kesehatan, terutama terkait stunting, masih jarang ditemukan. Teori *Collective Action*, yang dikembangkan oleh Carlsson, (2000), menyatakan bahwa efektivitas aksi kolektif sangat dipengaruhi oleh beberapa dimensi, di antaranya: faktor kontekstual, definisi masalah, pertumbuhan dan penyebaran

keyakinan umum, faktor pendorong, mobilisasi aktor, serta koordinasi dan kontrol. Dalam konteks stunting di Sulawesi Barat, faktor kontekstual yang terkait dengan budaya pernikahan dini perlu dipahami dengan baik sebagai salah satu penghambat utama dalam penurunan angka stunting. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana aksi kolektif dapat diwujudkan melalui jaringan implementasi kebijakan di tingkat provinsi dan daerah.

Pentingnya kolaborasi antar aktor dalam menyusun kebijakan percepatan penurunan stunting telah diakui dalam berbagai kajian, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah kurangnya koordinasi antar sektor dan kurangnya komitmen bersama dalam penanggulangan stunting. Selain itu, rendahnya kualitas kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola program intervensi gizi juga menjadi kendala yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang dapat mengevaluasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya angka stunting di Sulawesi Barat serta hambatan dalam implementasi kebijakan yang ada.

Penelitian ini menempatkan dirinya pada irisan antara studi *collective action* dan implementasi kebijakan kesehatan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi bagaimana dimensi-dimensi *Collective Action* berinteraksi dalam jaringan implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan memadukan pendekatan *Collective Action* dan analisis jaringan kebijakan, serta menyoroti peran budaya lokal dan kapasitas pemerintahan desa dalam keberhasilan program penanggulangan stunting.

Melalui pendekatan jaringan dan aksi kolektif, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi aktor-aktor dalam jaringan implementasi kebijakan penanggulangan stunting serta mengevaluasi hambatan yang mengganggu koordinasi dan komitmen lintas sektor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang mendukung formulasi strategi kebijakan yang lebih inklusif, terkoordinasi, dan berbasis kebutuhan lokal untuk percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Collective Action* dalam Jaringan Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Barat". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana aksi kolektif dalam jaringan pemerintahan dapat berkontribusi pada percepatan penurunan stunting, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung implementasi kebijakan yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pencegahan stunting di Provinsi Sulawesi Barat dan bagaimana penanganannya dengan menggunakan teori *Collective Action* dalam jaringan implementasi kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap masalah sosial dan kebijakan yang ada (Cresswell, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, yang menjadi salah satu pusat koordinasi kebijakan terkait penanggulangan stunting di provinsi tersebut. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yang bertujuan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan mendalam dan relevansi terhadap topik penelitian. Sebanyak 9 (sembilan) informan dipilih, terdiri dari pejabat pemerintahan dan masyarakat yang terdampak oleh masalah stunting. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan menetapkan 9 (Sembilan) orang sebagai informan. Adapun pejabat pemerintahan yang akan dilakukan pendalaman terkait penelitian ini yakni 1) Pj. Gubernur Sulawesi Barat., 2) Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Komisi II)., 3) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat., 4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat., 5) Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat., 6) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat., 7) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Barat., 8) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Sulawesi Barat., 9) Masyarakat Terdampak Stunting.

Selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan studi dokumentasi. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik Utama, 1) Observasi yaitu melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan stunting, termasuk program-program pemerintah di lapangan, interaksi antar aktor, dan dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan. 2) Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terkait upaya penanggulangan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. 3) Studi Dokumentasi dalam pengumpulan data melalui dokumen-dokumen terkait kebijakan, laporan kegiatan, serta data statistik yang relevan dengan program penurunan stunting di daerah tersebut.

Data yang diperoleh dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis ini melibatkan pengkodean data, kategorisasi, dan pemahaman mendalam terhadap pola-pola yang muncul dari data yang dikumpulkan. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dan naratif, sesuai dengan fokus penelitian mengenai upaya percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi data, yang mencakup perbandingan informasi yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan studi dokumentasi). Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh berasal dari sumber yang valid dan dapat dipercaya, serta untuk mengurangi bias yang mungkin timbul dari satu metode atau sumber data.

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengadopsi framework analisis yang didasarkan pada teori *Collective Action* yang dikemukakan oleh Carlsson (2000). Framework ini digunakan untuk menginterpretasi dinamika hubungan antara aktor-aktor dalam jaringan implementasi kebijakan, dan bagaimana koordinasi antar sektor dapat mempercepat pencapaian tujuan bersama, yaitu penurunan angka stunting. Framework ini akan digunakan untuk memahami bagaimana tindakan kolektif dapat dijalankan dalam konteks

penanggulangan stunting, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan.

Lebih lanjut fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis upaya percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat melalui pendekatan *Collective Action* dalam jaringan implementasi kebijakan. Penelitian ini akan menggali bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor kesehatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting di wilayah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Collective Action* dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Barat

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai dalam jangka waktu panjang, yang menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Kondisi stunting dapat terjadi sejak dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Menurut Laili dan Andriyani (2019), stunting mengacu pada gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam periode yang lama, yang berdampak pada rendahnya tinggi badan anak dibandingkan dengan standar usia mereka. Rahman dan Triawati (2016) juga mengemukakan bahwa, stunting pada anak berkaitan dengan kekurangan gizi pada ibu hamil, yang berujung pada kondisi anak yang lebih pendek dari standar tinggi badan sesuai usia.

Stunting bukan hanya berdampak pada perkembangan fisik anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam jangka panjang karena penurunan produktivitas kerja serta tingginya biaya perawatan kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting dapat dibedakan menjadi faktor internal, seperti pola makan dan kesehatan ibu, serta faktor eksternal, seperti pendidikan orang tua, tempat tinggal, dan perilaku hidup, yang semuanya berperan dalam menentukan status gizi anak (Ibrahim & Faramita, 2015).

Penelitian ini mengadopsi teori *Collective Action* yang dikemukakan oleh Carlsson (2000), yang mengkaji bagaimana kelompok atau aktor dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Carlsson

menjelaskan bahwa *Collective Action* terjadi melalui hubungan koordinasi antara aktor-aktor yang terlibat dan sejauh mana mereka memiliki kepentingan bersama dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks stunting, *Collective Action* menggambarkan bagaimana berbagai aktor pemerintah, masyarakat, dan sektor lain dapat bersinergi untuk menurunkan angka stunting melalui kebijakan yang lebih terkoordinasi dan efektif. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penanggulangan stunting dengan pendekatan yang lebih terfokus pada program intervensi gizi dan kesehatan, namun sedikit yang mengkaji bagaimana kolaborasi antar aktor dalam *Collective Action* dapat mempercepat penurunan angka stunting.

Sebagai perbandingan, penelitian oleh Sari dan Handayani (2020), berfokus pada implementasi kebijakan stunting dengan pendekatan sektoral, namun tidak mengeksplorasi peran koordinasi lintas sektor dalam detail. Penelitian ini berfokus pada dimensi *Collective Action* dan sinergi antara aktor dalam konteks kebijakan percepatan penurunan stunting, yang belum banyak dieksplorasi. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Rukmana (2020), yang menganalisis kebijakan dari perspektif teori dan hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kualitas *sharing informasi* dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan masih rendah. *Resources Exchange* dalam kebijakan ketahanan pangan masih terbatas. Koordinasi dalam jaringan organisasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bone menggunakan tipe koordinasi mutual adjustment.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sirajuddin (2022), terkait Program Gammarana tidak signifikan mencegah stunting, kualitas optimal dengan akselerator faktor pemerintah, program, tenaga gizi pendamping, pemberian makan, pemantauan pertumbuhan dan sanitasi. Straregi Gammarana adalah dapat perluas ke desa lokus stunting baru, dengan syarat tertentu. Saran Gammarana dapat direplikasi, sesuai dengan syarat memperbaiki cakupan, kepatuhan dan pelibatan masyarakat. Objek Penelitian berfokus pada masalah stunting dan hubungannya dengan program yang digalakkan pemerintah dana adapun hasil penelitian tersebut belum maksimal.

Temuan dari berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya koordinasi antara sektor seperti halnya kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi

sering kali menjadi kendala dalam upaya penanggulangan stunting. Selain itu, komitmen dari pemangku kepentingan juga menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Penelitian ini menyoroti bagaimana dimensi koordinasi, partisipasi aktor, dan mobilisasi sumber daya dalam aksi kolektif dapat disintesis untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Implikasi teoretis untuk pengembangan konsep *Collective Action* dalam penanganan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *Collective Action* dalam konteks kebijakan publik, khususnya dalam sektor kesehatan. Dengan menganalisis peran aktor-aktor dalam jaringan implementasi kebijakan, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana aksi kolektif dapat diimplementasikan dalam kebijakan percepatan penurunan stunting. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya koordinasi lintas sektor dan penyelarasan kepentingan berbagai aktor dalam pencapaian tujuan bersama.

Lebih lanjut keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan lokasi yang terbatas di Provinsi Sulawesi Barat, yang mengurangi generalisasi temuan terhadap daerah lain. Selain itu, penelitian ini hanya mengandalkan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga data kuantitatif yang lebih mendalam mengenai prevalensi dan dampak kebijakan terhadap angka stunting tidak dapat diperoleh. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan penggunaan data kuantitatif. Lebih lanjut adapun menjadi fokus dalam penelitian terkait dimensi dalam *Collective Action*, yang meliputi:

#### a) Faktor Kontekstual

Faktor kontekstual dianggap sebagai dasar dari semua jenis tindakan kolektif. Namun dalam penelitian penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat dalam faktor kontekstual mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, organisasi, dan budaya yang mempengaruhi stunting, seperti ketidaksetaraan akses kesehatan dan gizi di Sulawesi Barat. Faktor ini menjadi dasar perumusan kebijakan, termasuk peran serta masyarakat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menanggulangi stunting.

b) Definisi Masalah

Jaringan dibentuk atas dasar beberapa "masalah" yang harus dipecahkan. Pemangku kepentingan atau aktor harus setuju bahwa terdapat masalah yang mesti diselesaikan. Karena dengan adanya masalah, maka akan menimbulkan *Collective Action* dalam memecahkan masalah yang telah ditetapkan oleh mereka. Namun dalam penelitian penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat dalam Dimensi Definisi Masalah berfokus pada kerja jaringan dalam aksi bersama menanggulangi stunting, meninjau masalah stunting, solusi yang dihasilkan, serta faktor-faktor penyebab tingginya stunting di Sulawesi Barat.

c) Dimensi Pertumbuhan dan Kepercayaan

Tindakan kolektif didasarkan pada beberapa pemahaman di antara para aktor (dalam jaringan) mengenai jenis tindakan mana yang dianggap baik, buruk, dapat diterima, atau tidak diterima oleh seluruh pemangku kepentingan atau aktor. Namun dalam penelitian penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat dalam Dimensi Pertumbuhan dan Kepercayaan yaitu Permasalahan terkait dengan pertumbuhan anak dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi dan intervensi yang ditawarkan oleh pihak yang terlibat dalam penanggulangan stunting. Misalnya, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi tentang pentingnya nutrisi yang baik dapat menjadi hambatan dalam mengubah perilaku terkait pola makan dan perawatan anak serta pencegahan pernikahan usia dini oleh masyarakat diseluruh Provinsi Sulawesi Barat.

d) Faktor Pretisipasi

Cara khas untuk memicu kegiatan pembuatan kebijakan adalah dengan membuat keputusan politik; misalnya, peluncuran program kebijakan, tetapi mekanisme ini tidak begitu jelas seperti yang terlihat. Namun dalam penelitian penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat dalam Dimensi Faktor Pretisipasi yaitu ketidakstabilan ekonomi, konflik, atau bencana alam yang memicu stunting menjadi perhatian utama. Fokus pada faktor partisipasi berperan penting dalam mengurangi risiko stunting pada anak-anak di Sulawesi Barat.

e) Mobilisasi Aktor

Salah satu kegiatan dalam proses membangun jaringan. Dalam penelitian penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat dalam Dimensi Mobilisasi Aktor terkait dengan mobilisasi aktor atau pihak yang terlibat dalam penanggulangan stunting, termasuk dalam hal pengorganisasian, pemberdayaan, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional.

f) Koordinasi dan Kontrol

Kordinasi dan kontrol dapat dianggap sebagai mekanisme dalam satu individu, atau sebagai muncul dari proses interaksi antara individu. Namun dalam penelitian penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat dalam Dimensi Koordinasi dan Kontrol yaitu kurangnya koordinasi dalam alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, dan pengendalian program penanggulangan stunting dapat menghambat efektivitas dan mengurangi dampak program tersebut terhadap penurunan angka stunting di Sulawesi Barat.

Teori *Collective Action* yang dikemukakan oleh Carlsoon, (2000) menjelaskan bahwa konsep *Collective Action* sebagai tindakan yang diambil oleh anggota suatu kelompok untuk memajukan kepentingan bersama. *Collective Action* menekankan pada 6 (enam) dimensi yang meliputi dimensi faktor kontekstual, dimensi definisi masalah, dimensi faktor pretisipasi, dimensi faktor mobilisasi aktor, dan dimensi koordinasi dan kontrol. Penggunaan Teori tersebut untuk menganalisis fenomena penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini teori tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Berbagai hasil temuan penelitian telah mengarah pada sebuah kesimpulan yang menunjukkan bahwa *Collective Action* dalam upaya penurunan stunting di Sulawesi Barat masih belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melibatkan banyak sektor dalam perencanaan dan implementasi program penurunan stunting, koordinasi lintas sektor yang efektif masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan dalam penyelarasan data antar dinas, inkonsistensi dalam pelaksanaan program di tingkat lapangan, serta kurangnya komunikasi yang intensif antar lembaga menyebabkan

intervensi yang dilakukan belum mencapai sinergi penuh.

Masalah utama yang turut mempengaruhi efektivitas program penurunan stunting adalah masalah pernikahan dini. Di Sulawesi Barat, praktik pernikahan dini masih banyak terjadi, terutama di daerah pedesaan yang masih kental dengan tradisi dan budayanya. Pernikahan dini sering kali berujung pada kehamilan yang tidak didukung oleh kesiapan fisik maupun mental dari para ibu muda. Akibatnya, mereka cenderung kurang memahami pentingnya asupan gizi yang tepat selama kehamilan, yang berkontribusi pada risiko stunting pada anak yang dilahirkan. Selain itu, pernikahan dini juga berhubungan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan, yang semakin memperburuk kondisi keluarga dalam memberikan perawatan dan gizi yang memadai untuk anak-anak mereka.

Kemiskinan juga menjadi tantangan dalam upaya penurunan stunting di Sulawesi Barat. Banyak keluarga yang terdampak stunting hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pangan bergizi, dan pendidikan. Keterbatasan ekonomi membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak. Program-program bantuan sosial yang seharusnya menjadi solusi, sering kali tidak tersampaikan secara optimal karena tantangan dalam koordinasi distribusi dan minimnya pemantauan di tingkat lokal. Selanjutnya partisipasi masyarakat, yang seharusnya menjadi salah satu elemen penting dalam *Collective Action*, masih belum terintegrasi secara maksimal dalam perencanaan maupun pengawasan program. Masyarakat di beberapa daerah, khususnya di wilayah terpencil, masih kurang mendapatkan akses informasi dan edukasi yang memadai tentang peran mereka dalam pencegahan stunting. Program-program yang melibatkan komunitas lokal juga belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya penurunan stunting di daerah mereka. Tidak optimalnya penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat yang dalam hal ini dianalisis dengan menggunakan teori *Collective Action*, ditunjukkan dengan hasil-hasil penelitian terkait 6 (enam) dimensi teori sebagai berikut.

### Dimensi Faktor Kontekstual

Pertama, pada faktor kontekstual menunjukkan temuan bahwa kemiskinan yang mengakibatkan pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi stunting di Sulawesi Barat. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang berusia dibawah 18 tahun. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa Angka pernikahan di Sulawesi Barat dari tahun ke tahun masih tinggi, tercatat pada periode januari hingga mei 2023 perkawinan anak usia 15 hingga 19 tahun mencapai 1.347 kasus. Menurut Larasati *et.al*, (2018) menyebutkan bahwa kehamilan pada usia dini mempunyai risiko melahirkan bayi stunting. Stunting mengacu pada balita yang ditemukan tinggi badannya terlalu pendek untuk usianya (Anjani, 2022). Restiana, (2020) berpendapat bahwa Stunting dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan mulai dari pemberian makanan pelengkap (MP-ASI), pemberian ASI eksklusif, tinggi badan ibu, pendidikan, kelengkapan imunisasi dasar anak, usia saat menikah. Usia saat ibu menikah merupakan salah satu faktor yang berperan dalam terjadinya anak stunting.

Pernikahan usia dini menyebabkan kehamilan pertama juga terjadi di usia dini yang berpengaruh pada kesiapan ibu dalam mengasuh dan merawat anak dan Kesehatan reproduksi yang buruk, sehingga mengakibatkan anak yang lahir memiliki resiko kesempatan hidup yang rendah dan beresiko lebih besar memiliki masalah gizi seperti pendek, kurus, dan gizi buruk. Semakin muda usia ibu mengalami kehamilan maka akan semakin besar risiko anak mengalami stunting. Dampak dari *stunting* akan berlangsung seumur hidup bahkan mempengaruhi generasi berikutnya atau keturunannya dan perkembangan yang kurang di sisi kognitif motorik verbal, anak *stunting* akan mengalami Penurunan kecerdasan, produktivitas yang akan menghambat seluruh aktivitas, postur tubuh yang tidak maksimal ketika dewasa (lebih pendek jika dibandingkan dengan seumurannya), berisiko obesitas dan penyakit lainnya seperti resistensi insulin, serta diabetes gestasional dan mengalami penurunan terhadap kesehatan reproduksi (Permatasari, 2022).



### Dimensi Definisi Masalah

Dimensi definisi masalah menurut Carlsoon, (2000) berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan, dimensi ini tidak hanya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh mereka, namun juga kebutuhan dan tantangan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian mengenai dimensi definisi masalah menyatakan bahwa terdapat masalah yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam upaya penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat yaitu adanya keterbatasan anggaran dan distribusi sumber daya yang belum merata menjadi kendala signifikan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor. Dengan kata lain, perlu adanya komitmen yang kuat dari para pejabat daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang berperan penting dalam proses koordinasi, yaitu untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di daerah (Abbas, 2020).

Dalam teori *Collective Action*, pemangku kepentingan atau aktor harus setuju bahwa terdapat masalah yang mesti diselesaikan. Karena dengan adanya masalah, maka akan memicu munculnya *Collective Action* dalam memecahkan masalah yang telah ditetapkan oleh mereka (Carlsson, 2000). Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Smelser (1962) yang menjelaskan bahwa tindakan kolektif lahir sebagai akibat dari adanya ketegangan di lingkungan masyarakat, kesenjangan atau ketidakadilan, hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah masalah yang akan melahirkan tindakan kolektif. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus serupa, adanya masalah kebijakan tidak serta merta memicu munculnya tindakan kolektif. Sementara pada program penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan para pemangku kepentingan secara bersama memiliki kesamaan persepsi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan ini cenderung diselesaikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas kesehatan sebagai *leading sector* namun karena kurangnya anggaran dan keterbatasan koordinasi lintas sektor mengakibatkan terhambatnya proses penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Karena, jika permasalahan publik menjadi masalah yang kompleks, maka akan keterlibatan pemangku kepentingan atau aktor lain.

### Dimensi Pertumbuhan dan Penyebaran Kepercayaan Umum

Menurut Carlsoon, (2000), dimensi pertumbuhan dan penyebaran kepercayaan umum menjelaskan mengenai bagaimana para pemangku kepentingan memahami secara bersama-sama urgensi mereka terhadap penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat dan upaya kolektif yang dilakukan untuk menjadi *goals* yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing pemangku kepentingan di Sulawesi Barat memahami urgensi dari penurunan angka stunting dan upaya kolektif yang mereka lakukan untuk mencapai target yang telah disetujui. Dimana hal tersebut dapat dilihat melalui adanya program atau kegiatan yang bersifat terpadu lintas sektoral dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait hal penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil temuan penelitian tersebut secara jelas telah menggambarkan kesesuaian antara teori *Collective Action* yang dikemukakan oleh (Carlsoon, 2000) dengan realitas pelaksanaannya pada kasus penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan adanya keselarasan antara keyakinan, tujuan dan tindakan bersama para pemangku kepentingan. Sebagaimana Taufik, (2015) menjelaskan mengenai pentingnya keselarasan tersebut dalam konteks jaringan kebijakan. Dengan kata lain, Temuan penelitian yang menjelaskan dimensi pertumbuhan dan penyebaran kepercayaan umum, menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan memahami secara bersama urgensi penurunan stunting dan ada upaya kolektif yang dilakukan melalui lintas sektoral (*joint action*).

### Dimensi Pretisipasi

Carlsoon (2000) menjelaskan bahwa tindakan kolektif itu tidak muncul secara otomatis. Cara khas untuk memicu aktivitas tindakan kolektif adalah dengan membuat keputusan politik, misalnya saja dalam peluncuran sebuah program atau kebijakan, yang mekanismenya tidak begitu jelas maka berpotensi untuk menumbuhkembangkan jaringan kebijakan sebagai respon atas keputusan politik tertentu. Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi pretisipasi dalam penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa terlihat bahwa ada keputusan politik yang kuat dan saling terkoordinasi untuk menangani stunting melalui

tindakan kolektif yang melibatkan berbagai sektor. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk dalam hal penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat baik itu melalui program, kegiatan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang pendapat dari Carlsoon, (2000) yang mengatakan bahwa sebaiknya terdapat keputusan politik yang dibuat untuk mendorong para aktor atau pemangku kepentingan untuk secara bersama bergerak untuk bekerja memecahkan masalah dan menjalankan kebijakan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat.

### **Dimensi Mobilisasi Aktor**

Menurut Carlsoon, (2000), dimensi mobilisasi aktor dimaknai sebagai upaya dan metode pemerintah daerah atau leading sector yang diwakili oleh Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk memobilisasi dan melibatkan para pemangku kepentingan lain. Dalam hal ini dinas terkait dalam menjalankan berbagai upaya kebijakan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada koordinasi yang kuat di antara berbagai dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, yang semuanya memiliki peran spesifik dalam penanggulangan stunting. Pemerintah daerah, melalui kepemimpinan Pj. Gubernur dan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang berfungsi sebagai penggerak utama untuk mengkoordinasikan berbagai program.

Partisipasi masyarakat juga diakui sebagai hal yang penting, terutama melalui peran kader posyandu, kelompok PKK, dan komunitas lokal yang menjadi ujung tombak dalam penyuluhan dan pemberian layanan langsung kepada keluarga yang terdampak stunting. Setiap dinas memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Pemangku kepentingan masing-masing berperan menjalankan tugasnya bersamaan dengan melakukan upaya tindakan kolektif. Karena dalam hal penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat, pelibatan berbagai aktor menjadi sebuah keharusan. Sebab masalah stunting menjadi isu yang krusial di Provinsi Barat dan tidak dapat dipungkiri tindakan memobilisasi para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan publik merupakan wujud dari

jaringan kebijakan. Dimana Smelser (1962) menyebutnya sebagai mobilisasi pemeran serta dalam gagasan *Collective Behavior* yang dikemukakan olehnya.

### **Dimensi Koordinasi dan Kontrol**

Carlsoon, (2000) berpendapat bahwa dimensi koordinasi dan kontrol adalah bagaimana mekanisme yang didesain oleh pemerintah daerah untuk menjalankan aktivitas koordinasi antar aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat, selain itu mekanisme kontrol dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan atau program-program penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan di Sulawesi Barat, terlihat bahwa meskipun upaya penurunan stunting sudah menjadi fokus utama pemerintah daerah, masih ada berbagai tantangan yang harus diatasi, terutama terkait dengan koordinasi dan kontrol antarinstansi. Bentuk koordinasi dan kontrol dalam penurunan stunting di Sulawesi Barat saat ini masih terbatas pada perencanaan formal dan pertemuan lintas sektor yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Meskipun sudah ada mekanisme seperti pembentukan *task force* yang melibatkan berbagai instansi terkait, implementasi koordinasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Pertemuan antarinstansi, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, sering kali hanya berfokus pada sinkronisasi data dan pembagian tugas, namun tindak lanjut di lapangan kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya keterlibatan aktif di tingkat desa serta keterbatasan dalam pengawasan dan evaluasi bersama di daerah terpencil. Koordinasi di lapangan antara instansi sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya komunikasi yang efektif, dan tidak adanya sistem kontrol yang terintegrasi untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana. Kontrol terhadap pelaksanaan program penurunan stunting, sementara itu, masih bergantung pada laporan administratif dan pengawasan parsial oleh masing-masing dinas.

Pengawasan terpadu yang melibatkan semua sektor belum sepenuhnya berjalan. Selain itu, pemantauan berbasis data yang akurat juga belum optimal, sehingga kesulitan dalam

mengevaluasi capaian program sering terjadi. Temuan penting penelitian berkaitan dengan dimensi koordinasi dan kontrol yang tidak dilakukan secara intensif oleh pemangku kepentingan, menunjukkan ketidaksesuaian dengan gagasan *Collective Action* yang disampaikan oleh Carlsoon, (2000), dimana koordinasi dan kontrol merupakan faktor penting. Lebih lanjut, kontrol dan koordinasi adalah entitas yang berkaitan satu sama lain, dimana kontrol dapat dianggap sebagai mekanisme dalam satu individu yang muncul dari proses interaksi antar individu. Padahal seharusnya sistem koordinasi sebagai dimensi pokok sistem jaringan antar organisasi haruslah berjalan secara efektif untuk menentukan dan melaksanakan strategi (Alwi, 2007). kemudian, Susanti (2012), dalam penelitiannya menekankan pentingnya sistem informasi dan koordinasi dalam menentukan strategi yang tepat oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar mengenai pelayanan pendidikan berbasis jaringan.

Teori *Collective Action* yang dikemukakan oleh Carlsoon, (2000) menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan idealisme perspektif jaringan sebagaimana diuraikan dalam berbagai literatur. Rendahnya tingkat komitmen di antara pemangku kepentingan memperumit kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kondisi ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru berbasis *evidence-based policy* yang mampu menangani akar masalah stunting secara holistik. Dalam konteks penelitian ini, *Collective Action* seharusnya lebih menekankan pada pentingnya *resource sharing* melalui tindakan kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menjadi sangat krusial karena pemangku kepentingan utama (leading sector) sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, sehingga membutuhkan mekanisme pertukaran dan sinergi sumber daya dengan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas upaya penurunan stunting.

Dalam pengembangan penelitian mendatang, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model kolaborasi lintas sektor yang lebih spesifik, seperti kajian tentang efektivitas mekanisme koordinasi berbasis

teknologi digital untuk mendukung pertukaran sumber daya secara real-time. Selain itu, penelitian mengenai bagaimana peran aktor non-pemerintah (misalnya organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga donor) dalam memperkuat jaringan kolaborasi untuk penurunan stunting juga dapat menjadi topik yang relevan. Pendekatan berbasis *behavioral insights* untuk meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam kolaborasi lintas sektor juga menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks pengambilan keputusan dan pelibatan masyarakat secara aktif.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terkait *Collective Action* Dalam Jaringan Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Barat dikatakan belum maksimal. Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dalam penanganan Stunting di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut.

1. Dimensi faktor kontekstual, perlu dilakukan pendekatan untuk menangani kemiskinan yang merupakan akar terjadinya pernikahan dini dan stunting. Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan yaitu pemberian insentif bagi keluarga yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi dan Kesehatan untuk mengurangi angka kemiskinan dan stunting.
2. Dimensi definisi masalah, perlu dilakukan penyusunan kebijakan anggaran bersama yang lebih fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan distribusi sumber daya manusia dalam penanganan stunting.
3. Dimensi Pertumbuhan dan penyebaran kepercayaan umum, perlu ada kesepakatan bersama mengenai pentingnya stunting sebagai masalah prioritas.
4. Dimensi partisipasi, perlu dibentuk forum koordinasi lintas sektor yang lebih rutin dan terstruktur serta melibatkan masyarakat dalam penyusunan program yang lebih relevan khususnya daerah-daerah terpencil.
5. Dimensi mobilisasi aktor, dilakukan dengan meningkatkan penguatan TPPS melalui pelatihan dan pembekalan yang terorganisir, serta perlu adanya dukungan

anggaran untuk memfasilitasi koordinasi lintas sektor.

6. Dimensi koordinasi dan kontrol, perlu membentuk sistem kontrol berbasis teknologi yang memungkinkan pemantauan program penurunan stunting secara *real-time* di lapangan.

Rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerapan model *Collective Action* dalam pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus mengatasi hambatan yang teridentifikasi dalam dimensi-dimensi yang belum optimal yang pada akhirnya dapat dilakukan secara terpadu dan konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi. 2007. *Analisis Jaringan Antar Organisasi Dalam Penentuan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Terpadu (BP- KAPET) Parepare Provinsi Sulawesi Selatan)*. Universitas Hasanuddin.
- Anjani, S. (2022). *Hubungan Antara Pernikahan Ibu Usia Dini Dan Asupan Protein Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 0-59 Bulan* (Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas Maesan Kabupaten Bondowoso).
- Abbas, A. (2020). Potensi Pangan Fungsional Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesehatan Manusia Yang Semakin Rentan Mini Review. *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 14(2), 176–186. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v14i2.14319>.
- Bogdanor, V. (Ed.). 1987. *The Blackwell Encyclopedia Of Political Institutions*. New York, NY : Blackwell Reference.
- Carlsson. L. 2000. *Policy Network as Collective Action*. *Policies Study Journal*. 28(3), 502-520.
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, I. A. dan R. Faramita. 2015. Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Keluarga dengan Kejadian Stunting Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Barombong Kota Makassar Tahun 2014. *Public Health Science Journal* 7(1): 63-75.
- Laili, U., & Andriani, R. A. D. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 5(1), 8. [https://doi.org/10.32528/pengabdian\\_iptek.v5i1.2154](https://doi.org/10.32528/pengabdian_iptek.v5i1.2154)
- Larasati, D. A., Nindya, T. S., & Arief, Y. S. (2018). Hubungan antara Kehamilan Remaja dan Riwayat.
- Permatasari, C. (2022). *Pernikahan Usia Dini Dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo*. *HIGEIA (Journal of Public Health Research And Development)*, 6(1)
- Rahman T, Adhani R, Triawanti (2016). Hubungan antara status gizi pendek (stunting) dengan tingkat karies gigi. *Dentino J Ked Gigi*; 1(1): 89
- Restiana, R. P. (2020). Hubungan pernikahan usia dini dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan. *SKRIPSI-2020*.
- Rukmana S, Novayanti Sopia (2020) *Analisis Governance Network Dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bone*. Disertasi thesis, Universitas Hasanuddin.
- Sirajuddin, S. (2022). *Evaluasi Gammarana untuk Pencegahan Stunting Pada Usia 0-23 Bulan Di Kabupaten Enrekang*. Universitas Hasanuddin.
- Smelser, Neil. 1962. *Theory of Collective Behavior*, Third.
- Susanti, Gita, 2012. *Jaringan Pelayanan Publik Yang Demokratis Dengan Studi Kasus Penentuan Strategi Pelayanan Pendidikan Berbasis Jaringan Di Kota Makassar*. Disertasi. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Taufik, 2015. *Jaringan Kebijakan Publik Studi Kasus Implementasi Kebijakan Syari'at Islam Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh*. Tesis. Universitas Hasanuddin.
- Tilly, L.A., C. Tilly, en Social Science History Association. (1981). *Class conflict and collective action. New Approaches to Social Science History. Beverly Hills; London: Published in cooperation with the Social Science History Association [by] Sage Publications*.